

MODUL

Pengantar Sejarah dan Perabadan Iran

BAB V

Apa itu Stratifikasi Sosial?

Stratifikasi sosial adalah sistem pelapisan dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok dibedakan dan ditempatkan pada posisi yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kekuasaan, kekayaan, status, pekerjaan, atau keturunan.

Dalam masyarakat yang terstratifikasi, terdapat hierarki sosial yang membagi anggota masyarakat ke dalam beberapa lapisan (strata), mulai dari kelompok dengan status tinggi hingga kelompok dengan status rendah.

Ciri-ciri Stratifikasi Sosial:

Hierarkis – ada tingkatan dalam masyarakat, dari yang paling tinggi sampai paling rendah.

Dibentuk oleh sistem budaya, politik, ekonomi, dan agama.

Relatif tetap – terutama dalam masyarakat tradisional atau kuno, sulit untuk berpindah dari satu strata ke strata lain.

Menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban antar kelompok

Pengertian Strata dalam Stratifikasi Sosial

Strata berasal dari bahasa Latin stratum, yang berarti "lapisan." Dalam sosiologi, strata merujuk pada tingkatan atau lapisan sosial dalam masyarakat yang menunjukkan perbedaan posisi atau status antar individu atau kelompok.

Dengan kata lain, strata adalah posisi sosial yang berbeda satu sama lain berdasarkan ukuran tertentu, seperti:

Kekayaan atau ekonomi (kaya – miskin)

Kekuasaan atau politik (penguasa – rakyat biasa)

Pendidikan dan pengetahuan (cendekiawan – orang awam)

Agama atau kedudukan religius (imam/pemuka agama – jamaah)

Keturunan atau warisan darah (bangsawan – rakyat biasa – budak)

Sifat-Sifat Strata Sosial:

Vertikal (atas-bawah):

Strata disusun dari lapisan atas hingga bawah, mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya atau hak istimewa.

Hierarkis dan tertutup pada masyarakat tradisional:

Pada zaman kuno (seperti Iran pra-Islam), seseorang yang lahir di strata tertentu biasanya tidak bisa naik ke strata yang lebih tinggi (mobilitas sosial sangat terbatas).

Terbentuk oleh norma dan ideologi dominan:

Misalnya, dalam masyarakat Zoroastrian, pendeta (Mobed) dianggap lebih tinggi karena dianggap suci dan dekat dengan ajaran agama.

Contoh Sistem Strata Sosial:

1. Contoh sistem terbuka (modern):

Status dapat berubah karena pendidikan atau prestasi.

Contoh: masyarakat demokratis atau meritokratis.

2. Contoh sistem tertutup (tradisional/kuno):

Status ditentukan sejak lahir, sulit berubah.

Contoh: sistem kasta di India, sistem bangsawan dan budak di kerajaan Persia.

Hubungan dengan Masyarakat Iran Pra-Islam:

Dalam konteks Iran kuno (Achaemenid dan Sasanid), strata sosial menentukan:

Hak politik (siapa yang boleh memimpin)

Hak ekonomi (siapa yang punya tanah atau bisa berdagang)

Peran religius (siapa yang dianggap suci dan memimpin ibadah)

Akses pendidikan dan hukum

Jenis pekerjaan yang boleh dilakukan

Strata bukan hanya pembagian teknis, tapi sarana untuk mengatur kekuasaan dan kontrol sosial dalam masyarakat kuno.

Stratifikasi Sosial Iran Masa Pra-Islam

Masa pra-Islam di Iran mencakup beberapa periode penting sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 M. Selain Dinasti Achaemenid (550–330 SM) dan Sasanid (224–651 M), ada juga periode Medes (abad ke-7–6 SM) dan Parthia/Arsacid (247 SM – 224 M). Setiap periode memiliki sistem pelapisan sosial yang berbeda, namun tetap menunjukkan struktur hierarkis.

1. Periode Medes

Periode ini merupakan pendahulu Achaemenid, lebih sedikit informasi tertulis yang tersedia.

Kekuasaan terpusat pada bangsawan Medes dan kepala suku.

Pembagian sosial belum sepenuhnya formal, tetapi sudah terdapat diferensiasi antara elite militer dan rakyat biasa.

Sumber: Herodotus, Histories, Book I.

2. Dinasti Achaemenid (550–330 SM)

Struktur sosial lebih jelas dan tercatat dalam inskripsi serta laporan penulis Yunani.

Strata utama:

Keluarga kerajaan dan bangsawan tinggi

→ Termasuk Satrap (gubernur), pejabat tinggi, dan jenderal.

Pendeta Zoroaster (Magi)

→ Mempunyai kekuasaan spiritual dan terlibat dalam urusan negara.

Tentara profesional (termasuk Pasukan Abadi)

→ Memiliki status tinggi, dihormati.

Pedagang, pengrajin, petani

→ Tergolong rakyat biasa tetapi penting bagi ekonomi.

Budak dan pekerja paksa

→ Biasa berasal dari tawanan perang, digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Sumber:

Pierre Briant, *From Cyrus to Alexander* (2002)

Josef Wiesehöfer, *Ancient Persia* (2001)

3. Dinasti Parthia / Arsacid (247 SM – 224 M)

Parthia dikenal dengan sistem feodalisme tribal, yaitu struktur sosial berdasarkan aliansi suku dan pengaruh lokal.

Strata sosial:

Raja dan bangsawan (Arsacid dan keluarga lokal)

→ Kekuasaan pusat lemah, bangsawan daerah sangat berpengaruh.

Kepala suku dan pemimpin militer

→ Memiliki otonomi di wilayah masing-masing.

Pendeta Zoroaster

→ Masih memainkan peran dalam ritual dan sosial.

Petani dan rakyat kecil

→ Hidup di bawah perlindungan bangsawan lokal, memiliki sedikit hak.

Budak dan tahanan perang

→ Digunakan sebagai pekerja, tidak memiliki status hukum.

Sumber:

Malcolm A.R. Colledge, *The Parthians* (1967)

Richard Frye, *The Heritage of Persia* (1963)

4. Dinasti Sasanid (224–651 M)

Struktur sosial sangat ketat dan diwariskan secara turun-temurun.

Strata sosial resmi (empat kelas utama menurut teks Pahlavi):

Pahlawan / Ksatria (Arteshtar) – militer dan bangsawan.

Pendeta (Atwarran) – penjaga agama Zoroaster.

Penulis / Birokrat (Dibiran) – pengurus administrasi dan hukum.

Rakyat (Vastrioshan) – petani dan pengrajin.

Beberapa teks menyebutkan adanya kelas kelima: budak.

Sumber:

Touraj Daryaee, *Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire* (2009)

Arthur Christensen, *L'Iran sous les Sassanides* (1944)

Mengapa Ada Sistem Kasta atau Stratifikasi Sosial di Iran Pra-Islam?

1. Warisan Peradaban Indo-Iran Kuno

Sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Achaemenid dan Sasanid, masyarakat Iran kuno merupakan bagian dari rumpun Indo-Iran (turunan bangsa Indo-Eropa). Kelompok ini membawa struktur sosial berbasis kasta, mirip seperti yang berkembang di India kuno (sistem warna).

Masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok fungsional, misalnya:

Kelas religius (pendeta)

Kelas militer (ksatria)

Kelas petani dan pengrajin

Kelas budak atau pekerja rendahan

Pengaruh ini terbawa dalam masyarakat Medes, Achaemenid, dan Sasanid, meskipun tidak disebut “kasta” secara terminologis, namun fungsinya mirip: membatasi peran dan mobilitas sosial.

2. Kebutuhan Akan Stabilitas Politik dan Ekonomi

Kerajaan besar seperti Achaemenid dan Sasanid membentang sangat luas, dari Asia Tengah hingga Mesir.

Untuk mengelola wilayah yang luas dan beragam, diperlukan sistem sosial yang terorganisir dan stabil.

Pelapisan sosial memudahkan pembagian tugas dan kewajiban:

Raja dan bangsawan mengatur politik dan militer

Pendeta menjaga stabilitas keagamaan dan legitimasi kerajaan

Petani dan pengrajin menopang ekonomi

Stratifikasi ini menciptakan ketertiban administratif, tetapi sekaligus membatasi hak-hak rakyat biasa.

.

3. Peran Agama Zoroaster

Agama resmi di masa Achaemenid dan Sasanid adalah Zoroastrianisme, yang menekankan keteraturan dan dualisme (baik vs jahat, terang vs gelap).

Konsep keteraturan sosial menjadi bagian dari ajaran agama:

Setiap orang dilahirkan untuk menjalani peran tertentu

Melanggar peran sosial dianggap sebagai bentuk kekacauan (druj)

Karena itu, pendeta Zoroaster sangat berpengaruh, dan mereka juga mendorong sistem sosial yang tetap dan hierarkis.

4. Sistem Feodal dan Pemilikan Tanah

Di masa Sasanid, misalnya, tanah dikuasai oleh keluarga-keluarga bangsawan (dehqan), dan petani hanya bekerja di atas tanah itu tanpa hak milik. Ini menciptakan sistem feodal yang mengunci posisi sosial seseorang:

Bangsawan → pemilik tanah dan tentara

Petani → penggarap tetap

Budak → buruh paksa

Ini memperkuat ketimpangan dan memperkuat lapisan sosial.

5. Minimnya Mobilitas Sosial

Tidak seperti masyarakat modern, masyarakat kuno tidak mengenal mobilitas sosial yang bebas.

Seseorang yang lahir sebagai petani akan tetap menjadi petani, kecuali ada situasi luar biasa.

Tidak ada sistem pendidikan terbuka

Peran sosial diwariskan melalui keluarga

Perubahan status dianggap mengganggu ketertiban

Akibatnya, kasta sosial atau strata menjadi bersifat turun-temurun dan permanen

Peran Agama dalam Legitimasi Stratifikasi Sosial Iran Pra-Islam

1. Zoroastrianisme sebagai Agama Resmi

Zoroastrianisme merupakan agama utama di Iran kuno, terutama sejak Dinasti Achaemenid dan menjadi agama negara secara resmi di masa Dinasti Sasanid. Ajaran Zoroaster (Zarathustra) mengajarkan dualisme kosmis antara kebaikan (asha) dan kejahatan (druj). Konsep ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga diterapkan dalam struktur sosial.

2. Agama dan Keteraturan Sosial

Dalam Zoroastrianisme:

Setiap individu diyakini memiliki tempat dan tugas tertentu dalam masyarakat.

Keteraturan sosial mencerminkan keteraturan kosmis; gangguan terhadap struktur sosial dipandang sebagai bentuk kekacauan (druj).

Dengan kata lain, struktur sosial yang hierarkis dianggap bagian dari tatanan ilahi.

Implikasinya: posisi sosial dianggap bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga terkait dengan kebenaran spiritual.

3. Pendeta sebagai Kelas Sosial Tinggi

Kelas pendeta Zoroaster dikenal sebagai Magi (di masa Achaemenid) dan Mobed / Herbed (di masa Sasanid).

Mereka bertugas memimpin ritual, menjaga api suci, dan mengawasi doktrin agama.

Di masa Sasanid, pendeta bahkan memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif, terlibat dalam pengadilan dan administrasi negara.

Kelas ini mendapat hak istimewa dan dihormati sebagai penjaga kesucian.

Catatan: Para mobed sering bekerja sama langsung dengan raja untuk mengontrol masyarakat.

4. Agama sebagai Legitimasi Kekuasaan Raja

Raja-raja Achaemenid dan Sasanid menampilkan diri sebagai wakil Tuhan (Ahura Mazda) di bumi.

Di batu prasasti Behistun (Darius I), misalnya, Darius menyatakan bahwa ia mendapat kekuasaan langsung dari Ahura Mazda.

Dalam Sasanid, raja disebut “kay” atau “shahanshah”, dan disucikan oleh pendeta melalui ritual tertentu.

Kekuasaan politik tidak bisa dilepaskan dari legitimasi keagamaan.

5. Hierarki Sosial Berdasarkan Prinsip Religius

Teks-teks Pahlavi dari masa Sasanid, seperti Kār-nāmag ī Ardaxšīr ī Pābagān dan Dēnkard, menggambarkan empat kelas utama dalam masyarakat:

Pendeta (Atwarran) – pengajar agama dan penjaga api suci.

Prajurit (Arteshtar) – pelindung kerajaan.

Penulis/administrasi (Dibiran) – pengelola urusan negara.

Petani dan rakyat biasa (Vastrioshan) – penghasil pangan.

Makna teologisnya: semua kelas dibutuhkan untuk menjalankan kehendak Tuhan dan menjaga dunia tetap dalam “asha” (ketertiban).

6. Agama sebagai Alat Kontrol Sosial

Melalui sistem kasta keagamaan:

Mobilitas sosial ditekan, karena berpindah strata dianggap melawan kehendak ilahi.

Tindakan yang tidak sesuai dengan peran sosial dianggap dosa spiritual.

Budaya “ketaatan pada tatanan” diperkuat melalui khutbah, ritual, dan pendidikan agama.

7. Konsekuensi Sosial

Stratifikasi sosial menjadi sakral dan tidak fleksibel.

Rakyat menerima posisi sosial mereka sebagai bagian dari “nasib spiritual”.

Raja dan pendeta bekerja sama untuk menstabilkan negara dan menekan pemberontakan.

Perempuan dalam Stratifikasi Sosial Iran Pra-Islam

Stratifikasi sosial di Iran kuno tidak hanya membagi masyarakat berdasarkan kelas kekuasaan atau pekerjaan, tetapi juga berdasarkan gender. Posisi perempuan dalam sistem ini sangat ditentukan oleh latar belakang sosialnya (bangsawan, rakyat, budak) dan oleh konteks keagamaan serta hukum yang berlaku, terutama ajaran Zoroaster dan kebijakan kerajaan.

1. Perempuan Bangsawan dan Keluarga Kerajaan

Di masa Achaemenid, perempuan bangsawan (khususnya anggota keluarga kerajaan) memiliki pengaruh politik dan ekonomi, walaupun tidak memegang kekuasaan langsung.

Beberapa perempuan Achaemenid seperti Parysatis (istri Darius II) dan Atossa (putri Cyrus) dikenal berpengaruh dalam istana dan diplomasi.

Perempuan bangsawan dapat memiliki tanah, budak, dan kekayaan pribadi, berdasarkan dokumen ekonomi dari Persepolis.

Catatan: Meskipun tidak tampil di ruang publik seperti laki-laki, mereka aktif dalam pengelolaan ekonomi istana dan keluarga.

2. Perempuan Rakyat Biasa

Dalam masyarakat agraris, perempuan rakyat umumnya bekerja dalam rumah tangga, pertanian, atau kerajinan. Peran mereka lebih fungsional daripada politis, dan status sosialnya tergantung pada suami atau ayah.

Ada bukti bahwa perempuan pekerja di wilayah Persepolis dibayar dan diberi jatah makanan — tanda adanya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi mereka, walaupun tetap dalam posisi subordinat.

3. Perempuan dalam Sistem Budak

Budak perempuan berasal dari tawanan perang atau keturunan budak.

Mereka tidak memiliki hak hukum, sering dijadikan pelayan, pekerja kasar, atau objek seksual.

Dalam sistem ini, status budak perempuan adalah lapisan terbawah, tanpa akses terhadap pendidikan atau properti.

4. Perempuan dan Hukum Zoroaster

Dalam ajaran Zoroaster, perempuan memiliki peran ritual tertentu, seperti menjaga kesucian rumah dan api suci.

Namun, hukum Pahlavi (terutama masa Sasanid) mengatur perempuan secara ketat, misalnya:

Perempuan harus menjaga “kesucian” untuk menjaga harmoni kosmis (asha).

Menikah diatur oleh keluarga; pernikahan antar kerabat (xwedodah) bahkan dianjurkan dalam beberapa aliran Zoroaster.

Catatan: Secara teologis, perempuan dianggap penting dalam menjaga keturunan dan moral keluarga, tetapi dibatasi secara sosial dan hukum.

5. Hak Waris dan Kepemilikan

Di masa Achaemenid, beberapa dokumen menunjukkan bahwa perempuan bisa mewarisi dan memiliki tanah, terutama dalam konteks bangsawan.

Di masa Sasanid, hak waris perempuan semakin dibatasi, dan kepemilikan sering beralih ke kerabat laki-laki kecuali ada surat wasiat khusus.

6. Perempuan dan Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial perempuan sangat terbatas. Jika lahir sebagai budak, hampir tidak mungkin naik ke kelas pekerja bebas.

Perempuan bangsawan bisa jatuh statusnya jika diceraikan atau keluarganya kehilangan kekuasaan.

Mobilitas Sosial dan Ketertutupan Kasta di Iran Pra-Islam

Pengertian

Mobilitas sosial adalah kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari satu lapisan sosial (strata) ke lapisan lain, baik ke atas (mobilitas vertikal naik) maupun ke bawah (mobilitas vertikal turun).

Dalam masyarakat kuno seperti Iran pra-Islam, mobilitas sosial sangat terbatas atau bahkan tertutup, artinya seseorang yang lahir dalam suatu kelas sosial hampir selalu akan tetap berada di kelas itu seumur hidupnya.

1. Ketertutupan Kasta dalam Sistem Sosial Achaemenid dan Sasanid

A. Achaemenid (550–330 SM)

Meskipun kekaisaran ini mengelola wilayah multikultural dan multietnik, sistem sosial tetap berlapis.

Status seseorang (bangsawan, pendeta, tentara, rakyat biasa, budak) ditentukan sejak lahir.

Mobilitas ke atas sangat jarang, kecuali dalam:

Jasa luar biasa dalam militer.

Adopsi atau pernikahan dengan keluarga elite (sangat terbatas dan bersifat politis).

Mayoritas rakyat tidak memiliki jalan untuk naik ke posisi elite atau administrasi pusat.

B. Sasanid (224–651 M)

Sistem kelas sosial lebih resmi dan ketat, dibagi ke dalam empat kelas utama:

Pendeta (Atwarran)

Prajurit (Arteshtar)

Birokrat/Penulis (Dibiran)

Petani/Rakyat biasa (Vastrioshan)

Setiap kelas ditentukan secara turun-temurun, dan perpindahan antar kelas dilarang secara hukum maupun adat.

Bahkan pernikahan antar kelas dibatasi.

Dalam teks Pahlavi, perpindahan dari satu kelas ke kelas lain dianggap menyalahi tatanan kosmis (asha), dan bisa dianggap sebagai bentuk kekacauan atau dosa.

2. Faktor Penghambat Mobilitas Sosial

a. Asal-usul Kelahiran

Status sosial diwariskan dari orang tua.

Anak bangsawan akan menjadi bangsawan; anak petani akan menjadi petani, kecuali terjadi kehancuran ekonomi atau politik yang besar.

b. Agama Zoroaster

Mendorong keteraturan dan pembagian peran sosial secara tetap.

Menganggap setiap orang punya tugas tetap dalam struktur masyarakat sesuai kehendak Tuhan.

c. Struktur Ekonomi Feodal

Kepemilikan tanah dikuasai oleh bangsawan dan pendeta.

Petani tidak memiliki akses ke tanah, hanya bekerja di lahan milik orang lain.

Struktur ini memperkuat posisi elite dan membatasi kesempatan rakyat untuk naik status.

d. Politik dan Militer

Hanya bangsawan atau anak bangsawan yang bisa masuk ke struktur pemerintahan atau menjadi perwira militer.

Rakyat biasa hanya bisa menjadi tentara rendahan, tanpa peluang naik pangkat secara signifikan.

3. Apakah Ada Mobilitas Sosial?

Dalam beberapa kondisi luar biasa, mobilitas terbatas bisa terjadi, misalnya:

Seorang prajurit rakyat yang menunjukkan keberanian luar biasa bisa diberi penghargaan, tapi bukan kenaikan kelas sosial permanen.

Di masa awal Achaemenid, integrasi elite lokal dari wilayah jajahan (seperti Babilonia atau Mesir) kadang terjadi demi stabilitas politik, namun ini bukan bentuk mobilitas individual rakyat biasa.

4. Konsekuensi Sosial dari Sistem Tertutup

Masyarakat bersifat statis dan stabil, tetapi tidak dinamis.

Ketidakadilan dan ketimpangan sosial sulit diubah.

Rakyat kecil tidak punya saluran aspirasi atau kemajuan kecuali melalui pemberontakan atau kehancuran struktur lama (seperti yang terjadi saat Islam datang ke Iran).

Pengaruh Sistem Stratifikasi Sosial Pra-Islam terhadap Iran Pasca-Islam

1. Islam sebagai Tantangan terhadap Sistem Kasta Tradisional

Ketika Islam masuk ke Iran (sekitar 640 M), agama ini membawa ajaran kesetaraan antar manusia di hadapan Allah. Secara teologis, Islam menolak sistem kasta atau status keturunan sebagai penentu martabat seseorang.

Namun dalam praktik sosial-politik, tidak semua struktur lama langsung runtuh. Sebagian unsur stratifikasi pra-Islam justru bertahan dan beradaptasi ke dalam sistem baru.

2. Kelanjutan Struktur Kekuasaan Lama

Banyak mantan bangsawan dan elite Sasanid yang masuk Islam dan diakomodasi oleh pemerintahan Islam awal (terutama pada masa Abbasiyah).

Mereka tetap memegang kekuasaan lokal sebagai pejabat administratif, penerjemah, atau penasihat.

Gelar dan kedudukan lama seringkali tetap digunakan dalam kehidupan sosial dan birokrasi.

Contoh:

Keluarga Barmakid (keluarga Iran asal Balkh) menjadi menteri berpengaruh di bawah Khalifah Harun al-Rasyid.

3. Munculnya Mawali (Non-Arab Muslim)

Dalam sistem Umayyah awal, orang Persia yang masuk Islam (mawali) tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua dibandingkan orang Arab.

Mereka tidak langsung setara dalam hak politik atau ekonomi.

Baru di masa Abbasiyah, mawali memperoleh lebih banyak akses karena Abbasiyah mendapat dukungan besar dari kelompok non-Arab, termasuk Persia.

Implikasi:

Kesetaraan Islam formal tidak langsung meruntuhkan sistem sosial lama, terutama di wilayah bekas kekuasaan Sasanid.

4. Peran Ulama Menggantikan Pendeta Zoroaster

Struktur lama: Pendeta (mobed) → Ulama dan fuqaha (Islam).

Setelah Zoroastrianisme merosot, kelas baru ulama Islam (baik Sunni maupun Syiah) mengambil alih peran intelektual, hukum, dan moral yang sebelumnya dipegang oleh pendeta Zoroaster.

Di wilayah Iran yang kemudian didominasi Syiah (khususnya masa Safawi), ulama memiliki kekuasaan besar dalam pengadilan, pendidikan, dan kehidupan sosial.

5. Pelestarian Stratifikasi Ekonomi

Sistem pemilikan tanah dan ketimpangan ekonomi tetap berlangsung, meskipun dalam kerangka Islam.

Golongan kaya, pejabat, dan pemuka agama tetap berada di lapisan atas.

Petani, buruh, dan budak (walaupun Islam mendorong pembebasan budak) masih menempati posisi bawah.

6. Pewarisan Budaya Feodal di Masa Dinasti Islam Persia

Dinasti-dinasti lokal Persia pasca-Abbasiyah seperti Samanid, Buyid, Seljuk, hingga Safawi, meski berlabel Islam, tetap mempertahankan struktur sosial semi-feodal, seperti:

Kelas penguasa (amir, sultan)

Kelas ulama

Kelas tentara

Kelas petani dan buruh

Sistem ini mengingatkan pada struktur empat kelas di masa Sasanid.

7. Perempuan Pasca-Islam: Perubahan Parsial

Islam secara normatif memberikan hak waris dan status hukum kepada perempuan.

Namun dalam banyak wilayah Persia, praktik sosial tetap memengaruhi posisi perempuan, dan keterbatasan sosial yang mirip dengan masa pra-Islam masih terlihat.

8. Pergeseran Identitas Sosial dari Keturunan ke Keilmuan

Di bawah pengaruh Islam, status sosial mulai ditentukan oleh ilmu dan ketakwaan, bukan sekadar keturunan.

Ini terlihat dari naiknya derajat para ulama dan cendekiawan, bahkan dari latar belakang rakyat biasa.

Meski begitu, pengaruh darah bangsawan tetap kuat, terutama dalam politik dan pernikahan elite.

Kesimpulan:

Islam membawa visi kesetaraan sosial, namun pengaruh sistem stratifikasi pra-Islam tidak langsung hilang di Iran.

Sebaliknya, banyak elemen lama seperti:

hierarki kekuasaan,

peran elite religius,

struktur ekonomi,

dan pandangan terhadap status sosial,

bertransformasi dan melebur ke dalam sistem Islam, menciptakan bentuk baru dari pelapisan sosial yang tetap mencerminkan kesinambungan sejarah Iran kuno.

Stratifikasi Sosial di Iran Pasca-Islam

Setelah penaklukan Islam atas Iran (sekitar tahun 651 M), sistem sosial Iran tidak langsung berubah secara total. Justru terjadi proses adaptasi antara tatanan sosial Islam dan warisan struktur lama. Di bawah ini adalah struktur sosial yang berkembang selama tiga fase penting: Umayyah, Abbasiyah, dan Safawi.

Gambaran Umum Stratifikasi Sosial di Iran Pasca-Islam

1. Transisi dari Sasanid ke Islam

Pada tahun 651 M, Dinasti Sasanid runtuh setelah penaklukan Islam oleh kekuatan Arab Muslim.

Ajaran Islam membawa gagasan kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan (Allah), yang secara prinsip bertentangan dengan sistem kasta ketat Sasanid. Namun, dalam praktik sosial-politik, struktur hierarkis tidak langsung lenyap, melainkan mengalami transformasi: warisan sosial lama berbaur dengan sistem kekuasaan Islam.

2. Struktur Sosial Baru yang Terbentuk

Setelah masuknya Islam, masyarakat Iran mengalami stratifikasi sosial baru yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kelas Penguasa

Awalnya didominasi oleh Arab-Muslim, terutama pada masa Umayyah.

Di masa Abbasiyah dan setelahnya, orang-orang Persia mulai menempati posisi penting dalam administrasi dan politik.

b. Ulama (Kelas Agamawan)

Posisi yang sangat penting dalam masyarakat Islam, baik di bidang hukum, pendidikan, maupun keagamaan.

Di Iran, ulama Syiah nantinya menjadi sangat dominan (terutama pada masa Safawi).

c. Tuan Tanah dan Pedagang

Struktur ekonomi tetap berpusat pada pemilik tanah dan kelas dagang, banyak di antaranya merupakan keturunan elite lama Persia yang berasimilasi ke dalam Islam.

d. Rakyat Biasa

Petani, pengrajin, buruh, dan pekerja informal merupakan mayoritas.

Mereka tetap berada di lapisan bawah dalam struktur sosial, meskipun secara agama dianggap setara dengan Muslim lainnya.

e. Budak dan Non-Muslim

Budak masih ada dan digunakan untuk pekerjaan kasar, meskipun ajaran Islam menganjurkan pembebasan budak.

Komunitas non-Muslim (Zoroaster, Kristen, Yahudi) disebut dzimmi: dilindungi, tapi memiliki status sosial dan hak sipil yang terbatas.

3. Ciri-Ciri Stratifikasi Sosial Pasca-Islam

Agama menjadi landasan utama pembagian status sosial, terutama antara Muslim dan non-Muslim.

Asal etnis dan tingkat ketaatan beragama menjadi penentu posisi sosial.

Di masa awal (Umayyah), Muslim Arab memiliki kedudukan tertinggi, sedangkan mawali (Muslim non-Arab, termasuk Persia) berada di bawah mereka.

Di masa kemudian (Abbasiyah dan Safawi), keilmuan dan loyalitas mazhab (terutama kepada Syiah) menjadi faktor utama dalam struktur sosial.

4. Perubahan dan Kesenambungan

Kesetaraan Islam mendorong mobilitas sosial, terutama melalui jalur ilmu agama.

Namun banyak unsur sistem sosial lama bertahan, terutama dalam kepemilikan tanah, struktur ekonomi, dan pengaruh keturunan bangsawan.

Di masa Safawi (abad ke-16), struktur sosial kembali mengeras dan lebih tertutup karena ideologisasi mazhab Syiah dan sentralisasi kekuasaan raja (Shah).

Kesimpulan:

Stratifikasi sosial Iran pasca-Islam merupakan hasil perpaduan antara ajaran Islam dan warisan sosial-budaya Iran pra-Islam. Secara prinsip, Islam menawarkan kesetaraan. Tetapi dalam kenyataan sejarah:

Struktur sosial tetap bersifat hierarkis, meskipun berubah bentuk.

Kelas elite tetap mendominasi, hanya kini ditentukan oleh agama, ilmu, dan loyalitas politik, bukan hanya darah bangsawan.

Persia tidak hanya menerima Islam, tapi juga membentuknya, terutama melalui peran intelektual dan keulamaan dalam sejarah Islam dunia.

Stratifikasi Sosial Iran pada Masa Umayyah

1. Konteks Historis

Setelah penaklukan Islam atas Kekaisaran Sasanid (651 M), wilayah Persia masuk ke dalam kekuasaan Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus.

Meski membawa agama Islam yang secara teologis menekankan kesetaraan umat manusia, pemerintahan Umayyah bersifat Arab-sentris dan menerapkan struktur sosial yang membedakan antara Arab dan non-Arab.

2. Struktur Sosial pada Masa Umayyah di Iran

Struktur sosial di wilayah Iran pasca-penaklukan Umayyah secara garis besar terbagi ke dalam beberapa lapisan:

a. Khalifah dan Elite Arab-Muslim

Berasal dari suku Quraisy dan suku-suku Arab terkemuka.

Memegang puncak kekuasaan politik, militer, dan ekonomi.

Mengendalikan pengangkatan pejabat, distribusi rampasan perang, dan penarikan pajak.

b. Pejabat Arab Regional

Diangkat sebagai wali (gubernur) atau komandan militer di wilayah Persia (seperti Khurasan, Rayy, Isfahan).

Mendominasi birokrasi lokal dan bertindak sebagai perpanjangan kekuasaan pusat Damaskus.

c. Mawali (Muslim non-Arab, terutama Persia)

Mawali adalah sebutan bagi orang-orang non-Arab yang masuk Islam.

Di masa Umayyah, mereka tetap dianggap inferior secara sosial dan politik dibandingkan Muslim Arab.

Mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari rampasan perang, akses terhadap jabatan, atau hak yang setara dalam distribusi kekayaan negara.

Sering kali menjadi pelayan, pegawai rendahan, atau tentara tanpa pangkat.

d. Zimmi (Non-Muslim – terutama Zoroaster, Kristen, Yahudi)

Diberi status perlindungan oleh negara (ahl al-dhimmah), tetapi dibatasi hak-haknya.

Dikenai pajak jizyah (per individu) dan kharaj (pajak tanah).

Tidak memiliki hak militer atau jabatan dalam pemerintahan Islam.

Kehidupan agama mereka dilindungi, namun secara sosial berada di luar struktur utama umat Islam

e. Budak

Berasal dari tawanan perang atau perdagangan budak.

Berfungsi sebagai pelayan rumah tangga, pekerja kasar, bahkan tentara.

Dalam Islam, budak bisa dibebaskan (melalui mukatabah atau pemberian langsung), tetapi praktik perbudakan masih sangat lazim.

3. Karakteristik Umum Stratifikasi Sosial Umayyah di Iran

Bersifat etnosentris: Muslim Arab diposisikan lebih tinggi daripada Muslim non-Arab.

Tidak setara secara administratif dan ekonomi: meskipun secara keimanan dianggap Muslim, mawali tetap tidak mendapat hak yang setara.

Warisan elite Sasanid tidak sepenuhnya diberdayakan, kecuali mereka yang mau bergabung dan patuh pada sistem kekuasaan Umayyah.

4. Dampak Sosial dan Kultural

Orang-orang Persia mengalami keterasingan identitas, meskipun banyak dari mereka yang telah masuk Islam.

Muncul ketegangan sosial antara Arab dan Persia.

Hal ini memunculkan reaksi kultural berupa gerakan Syu'ubiyah, yaitu gerakan kesadaran etnis non-Arab (terutama Persia) yang menolak superioritas Arab dan menuntut pengakuan kesetaraan budaya.

5. Kontribusi Persia dalam Masa Umayyah

Meskipun terpinggirkan, banyak kaum mawali Persia yang mulai menonjol dalam bidang keilmuan, kesusastraan, dan administrasi tingkat bawah.

Mereka menjadi cikal bakal elite intelektual pada masa Abbasiyah.

6. Akar Kejatuhan Umayyah

Ketidakpuasan sosial yang luas, terutama di kalangan mawali Persia, menjadi salah satu faktor utama pemberontakan yang melahirkan Dinasti Abbasiyah.

Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 M didukung kuat oleh penduduk Khurasan dan wilayah Persia lainnya.

Kesimpulan:

Stratifikasi sosial Iran pada masa Umayyah bersifat tertutup, etnosentris, dan diskriminatif terhadap non-Arab, meskipun dalam kerangka negara Islam. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang pada akhirnya memicu perubahan politik besar-besaran di kemudian hari, yaitu transisi menuju pemerintahan Abbasiyah yang lebih terbuka terhadap non-Arab, terutama Persia.

Stratifikasi Sosial Iran pada Masa Abbasiyah

1. Konteks Historis

Dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah pada tahun 750 M, didirikan dengan dukungan kuat dari kalangan non-Arab, terutama orang Persia (Iran).

Ibu kota dipindahkan ke Baghdad, yang secara geografis dan kultural lebih dekat dengan Iran.

Dibandingkan dengan Umayyah, Abbasiyah lebih kosmopolit, inklusif, dan membuka jalan bagi partisipasi etnis Persia dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Struktur Sosial di Iran pada Masa Abbasiyah

a. Khalifah dan Elite Pemerintahan

Khalifah sebagai kepala negara dan agama, namun secara bertahap kekuasaan politiknya menjadi simbolis.

Banyak menteri, penasehat, dan pejabat tinggi berasal dari keluarga Persia, seperti Barmakid.

Administrasi dan sistem birokrasi banyak dipengaruhi oleh model Sasanid, termasuk pembagian tugas, perpajakan, dan protokol istana.

b. Ulama dan Cendekiawan

Menjadi kelas sosial yang sangat dihormati.

Terbagi menjadi:

Ulama fikih dan hadis (baik Sunni maupun Syiah).

Cendekiawan ilmiah (filusuf, astronom, dokter, penulis).

Banyak tokoh Persia seperti Imam Abu Hanifah, al-Farabi, al-Razi, Ibn Sina, al-Khwarizmi, berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Kelas ini memiliki mobilitas sosial terbuka, karena dihormati atas dasar ilmu dan takwa, bukan keturunan.

c. Tuan Tanah, Pedagang, dan Profesional

Para pemilik tanah besar, pedagang, dan pengusaha kaya merupakan kelas menengah-atas. Kelas ini berkembang pesat di kota-kota Iran seperti Nishapur, Rayy, Merv, dan Isfahan. Beberapa dari mereka menjadi patron ilmu dan seni.

d. Rakyat Biasa

Petani, buruh, pengrajin, dan pekerja informal. Hidup dalam sistem pertanian yang dikelola oleh tuan tanah. Membayar pajak kepada negara dan kadang dibebani sewa lahan.

e. Budak

Masih ada, berasal dari tawanan perang atau perdagangan. Budak bisa menjadi tentara, pelayan, atau pegawai istana. Islam menganjurkan pembebasan budak, dan banyak budak yang akhirnya menjadi orang bebas dan berpengaruh (misalnya tentara Mamluk).

f. Non-Muslim (Dzimmi)

Termasuk Zoroaster, Yahudi, Kristen, dan kelompok lainnya. Dikenai jizyah dan kharaj, tetapi dilindungi oleh hukum Islam. Beberapa tetap memainkan peran ekonomi penting, khususnya di bidang keuangan dan perdagangan. Dibatasi dalam bidang militer dan jabatan pemerintahan.

3. Ciri Khas Stratifikasi Sosial Abbasiyah di Iran

Tidak berdasarkan etnis semata: orang Persia mulai masuk ke dalam sistem kekuasaan, bahkan menjadi penentu arah kebijakan negara.

Ilmu dan keislaman sebagai pilar utama mobilitas sosial.

Terdapat ruang lebih besar bagi perpaduan budaya Arab dan Persia (Arab-Persian synthesis).

Pengaruh ajaran Islam tentang kesetaraan lebih terasa, meskipun masih ada ketimpangan ekonomi dan gender.

4. Peran Orang Persia dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Banyak keluarga Persia menjadi elite politik dan birokrat.

Bahasa Arab tetap bahasa resmi pemerintahan, tapi bahasa Persia kembali berkembang sebagai bahasa sastra dan budaya (terutama sejak abad ke-9).

Iran menjadi pusat kebangkitan budaya Islam klasik, dengan kota-kota seperti Baghdad, Balkh, dan Nishapur sebagai poros ilmu pengetahuan.

5. Kesenambungan dengan Sistem Lama

Beberapa struktur sosial masa Sasanid tetap ada secara fungsional, misalnya:

Tuan tanah besar → tetap memegang kekuasaan lokal.

Pejabat administrasi → diisi oleh keluarga elite Persia.

Namun sistemnya kini dibingkai dalam norma dan hukum Islam (syariat).

Kesimpulan:

Stratifikasi sosial pada masa Abbasiyah di Iran lebih terbuka dan fleksibel dibandingkan masa Umayyah, karena:

Persia tidak hanya ikut serta, tetapi menjadi motor utama dalam peradaban Islam.

Mobilitas sosial dimungkinkan lewat jalur keilmuan, agama, dan ekonomi.

Meski stratifikasi tetap ada, pembagiannya berbasis kemampuan dan keislaman, bukan sekadar keturunan atau etnis.

Stratifikasi Sosial di Iran Masa Dinasti Safawi

1. Konteks Sejarah

Dinasti Safawi didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501.

Menjadikan Syiah Itsna Asyariah (Syiah Dua Belas Imam) sebagai mazhab resmi negara — sebuah pergeseran besar dari mayoritas Sunni sebelumnya.

Membangun negara teokratik dengan struktur sosial yang sangat terkait dengan ideologi keagamaan dan loyalitas politik kepada raja.

2. Struktur Sosial Safawi

Stratifikasi sosial pada masa Safawi sangat hierarkis dan ideologis, dengan pembagian yang relatif kaku sebagai berikut:

a. Shah dan Keluarga Kerajaan

Raja (Shah) adalah penguasa absolut yang dianggap memiliki legitimasi spiritual dan politik.

Shah dilihat sebagai “bayangan Tuhan di bumi” dan penerus spiritual para Imam Syiah.

Kekuasaan bersifat turun-temurun dan sakral

b. Ulama Syiah (Mujtahid, Ayatollah, Akhund)

Ulama merupakan kelas terpelajar dan elite agama, menempati posisi tinggi dalam masyarakat dan negara. Mereka memegang otoritas dalam hukum (fiqh), pendidikan, wakaf, dan pengadilan agama. Dalam praktiknya, ulama dan negara saling menopang — ulama memberi legitimasi spiritual bagi Shah, dan Shah mendukung institusi keagamaan secara ekonomi dan politik.

c. Militer – Qizilbash

Qizilbash (berarti “kepala merah”) adalah kelompok militer Syiah yang menjadi pendukung utama Safawi saat awal berdiri.

Mereka diberi hak istimewa seperti tanah (iqta’) dan jabatan administratif.

Menjadi lapisan aristokrasi militer yang berkuasa, tetapi hubungan mereka dengan Shah kemudian menjadi tegang dan dikurangi pengaruhnya.

d. Tuan Tanah dan Pedagang Besar

Golongan kaya di perkotaan yang mengendalikan perdagangan dan hasil pertanian.

Beberapa berasal dari keturunan elite lama, tapi harus menunjukkan loyalitas terhadap Syiah dan Shah untuk mempertahankan statusnya.

Banyak terlibat dalam pendanaan keagamaan, pendidikan, dan kegiatan niaga antar kota dan antar negara (seperti ke India dan Kekaisaran Utsmani).

e. Petani dan Rakyat Biasa

Merupakan mayoritas populasi.

Hidup dari pertanian dan kerajinan.

Umumnya tergantung pada tuan tanah dan pajak negara, serta tidak memiliki hak politik.

Pendidikan dan mobilitas sosial sangat terbatas.

f. Budak dan Pelayan

Safawi masih mempraktikkan sistem perbudakan.

Budak berasal dari penaklukan di Kaukasus (Georgia, Armenia, dll) atau pembelian dari Asia Tengah.

Digunakan sebagai tentara (ghulam), pekerja rumah tangga, dan pelayan istana.

g. Kelompok Minoritas Agama

Termasuk Sunni, Kristen Armenia, Yahudi, Zoroaster.

Diizinkan hidup dan bekerja, namun:

Tidak boleh menyebarkan agama mereka.

Tidak mendapat akses pada jabatan publik atau militer.

Harus tunduk pada pengawasan dan membayar pajak tertentu.

3. Ciri Khas Stratifikasi Sosial Masa Safawi

Sangat terikat pada mazhab Syiah, sehingga loyalitas keagamaan menentukan posisi sosial dan politik.

Ulama menjadi kekuatan utama dalam menentukan hukum dan moral publik.

Raja dan agama tidak terpisah, melainkan saling menguatkan.

Mobilitas sosial sangat terbatas kecuali melalui pendidikan agama atau dukungan penuh terhadap kekuasaan Syiah.

4. Perbandingan dengan Era Sebelumnya

Berbeda dengan masa Abbasiyah yang relatif pluralistik dan ilmiah, masa Safawi:

Lebih ideologis dan terpusat.

Menekan mazhab selain Syiah.

Menjadikan agama sebagai alat kontrol sosial yang sangat kuat.

Kesimpulan:

Stratifikasi sosial masa Safawi bersifat teokratik, ideologis, dan sangat hierarkis. Kekuasaan politik, agama, dan militer saling berkelindan untuk membentuk kelas atas, sementara rakyat biasa, petani, dan minoritas tetap berada di posisi bawah.

Ajaran Syiah menjadi fondasi pembentukan identitas nasional Iran, dan sejak masa Safawi inilah Iran menjadi pusat utama dunia Syiah hingga hari ini.